

**Koordinasi Forum Pimpinan Dalam Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat
Di Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan**

**Enjel Timbuleng¹
Sofia E. Pangemanan²
Welly Waworundeng³**

Email Korespondensi: enjeltimbuleng08@gmail.com

ABSTRAK

Koordinasi merupakan salah satu tugas forum pimpinan kecamatan yang mesti dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pihak yang terlibat, dan juga sampai pada tingkat kelurahan, dalam hal menangani keamanan dan ketertiban masyarakat. Koordinasi yang dilakukan oleh forum pimpinan kecamatan bertujuan untuk menciptakan dan memelihara efektivitas lembaga-lembaga yang menjadi unit forum pimpinan kecamatan sehingga kegiatan menangani keamanan dan ketertiban masyarakat dapat tercipta dan dapat berjalan efektif. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui koordinasi forum pimpinan dalam keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun metode pengumpulan data yang akan di lakukan adalah melalui observasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak kecamatan melakukan koordinasi atau pertemuan dengan pihak keamanan agar dapat merencanakan atau mempersiapkan agenda patroli serta sosialisasi untuk para kepala desa agar dapat menjaga keamanan serta ketertiban kampung mereka masing-masing dan koordinasi ini dilakukan secara rutin oleh pihak pemerintah dan juga pihak keamanan

Kata Kunci: Koordinasi, Forum Pimpinan, Keamanan dan Ketertiban

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat dilaksanakan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlu diketahui, beberapa motif penyebab tindak kejahatan adalah kondisi yang serba kekurangan. Berdekatan dengan itu, motivasi ingin memenuhi kebutuhan hidup kesehariannya menjadi faktor penyebab tindak kriminal yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Perkembangan tersebut tentu saja menimbulkan dampak sosial bagi masyarakatnya. Disamping adanya dampak positif konstruktif, tentu ada dampak negatifnya, yaitu adanya pergaulan bebas remaja, pencurian, perampokan, penyalahgunaan narkoba, minuman keras dan lain sebagainya. Sengaja penelitian ini berfokus pada masalah mengenai bagaimana menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat, dikarenakan bagi masyarakat perlindungan terhadap keamanan merupakan sesuatu hal yang seharusnya diberikan oleh negara terhadap warga negaranya, dan sudah menjadi suatu keharusan negara memberikan jaminan keamanan dan ketertiban kepada masyarakat.

Sebagai problem sosial, gangguan keamanan dan ketertiban yang timbul dan berkembang di

masyarakat, menuntut kita untuk bersama-sama mencari solusi bagaimana cara mengatasinya secara bijaksana, di satu pihak kita harus menolong pelaku sebagai orang yang tersesat, di pihak lain kita harus melindungi masyarakat yang menjadi objek tindakan gangguan keamanan dan ketertiban. Oleh karena itu, segala upaya harus dilaksanakan sambil terus-menerus mencari cara yang efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Sesuai dengan hasil observasi awal yang ditemui menunjukkan bahwa koordinasi forum pimpinan dalam keamanan dan ketertiban masyarakat diyakini dapat memberi lingkungan yang ada tenang bagi masyarakat sekitar. Yang dimana di Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan merupakan salah satu kecamatan yang dikenal dengan sering terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini sesuai dengan pengamatan awal peneliti, di sebabkan oleh keadaan topografi yang berada di dataran tinggi, dengan iklim yang sejuk, memungkinkan masyarakatnya mengkonsumsi minuman keras, apalagi disaat ada acara pesta baik pernikahan, maupun duka, atau acara syukuran lainnya. Kebiasaan mengkonsumsi minuman keras inilah yang sering memunculkan kejadian mengganggu kamtibmas, apalagi bila sudah berlebihan, tidak terkontrol lagi antara emosi dan akal sehat, masih adanya budaya (mabuk di setiap acara tertentu), atau adanya kebiasaan minum setelah selesai bekerja di siang hari, menjadi pemicu tindak kriminal yang berujung pada adanya ketidaknyamanan atau mengganggu keamanan dan ketertiban lingkungan.

Adapun penyebab dari konflik antar kampung yang sering terjadi di kecamatan Maesaan : 1. Sumber konflik di wilayah Maesaan dikarenakan persoalan pemuda dan atau kelompok pemuda seperti: perilaku membuat keonaran di desa lain, pencurian, percecokan atau adu mulut, bersenggolan ketika berpapasan, kalah dalam perkelahian, dan dendam pribadi, 2. Fenomena konflik di wilayah Maesaan umumnya dipicu oleh tindakan-tindakan seperti : adanya ejekan dari satu pihak ke pihak tertentu, ketika berpapasan bersenggolan dengan pihak tertentu, membuat keonaran di lokasi tertentu guna memancing emosi pihak-pihak tertentu, mabuk di tempat umum dan 3. Konflik antar kampung di wilayah Maesaan tidak terbatas melibatkan kelompok pemuda, tetapi pada kasus-kasus tertentu melibatkan pula mereka yang sudah tergolong bukan pemuda lagi karena sudah berumur di atas 40 tahun.

Di kecamatan Maesaan sendiri telah mengukuhkan pengurus program mapalus kamtibmas ini sejak tahun 2012 yang lalu, namun dalam pelaksanaannya dilapangan kurang optimal, mengingat banyaknya kasus kriminalitas yang terjadi, yang tidak ditangani oleh mapalus kamtibmas ini, yang seolah-olah program ini dibuat tanpa ada aplikasi dilapangan. Namun sampai sejauh mana kebenaran dari asumsi ini, harus lebih dalam lagi dikaji dalam suatu penelitian ilmiah, untuk menelusuri permasalahan diatas, oleh karena itu penelitian ini mengkaji tentang Koordinasi Forum Pimpinan dalam Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan Maesaan. Yang menjadi permasalahan utama didalamnya itu adalah permasalahan atau pertikaian antar kampung yang sampai hari ini masih menjadi

permasalahan keamanan dan ketertiban yang harus ditangani oleh pemerintah kecamatan Maesaan terlebih khusus forum pimpinan dalam keamanan dan ketertiban masyarakat di kecamatan Maesaan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneliti melakukan penelitian terutama menangkap dari menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang akan diteliti dalam rangka untuk mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Dengan mempertimbangkan data di atas dan membatasi penelitian maka penelitian ini dilakukan di Kabupaten Minahasa Selatan Kecamatan Maesaan.

Pada fokus penelitian ini, peneliti memfokuskan koordinasi forum pimpinan dalam keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan, melihat akan hal itu peneliti akan menggunakan teori hasibuan (2011 : 42-43) tentang bagaimana koordinasi horizontal meliputi :

1. Camat
2. Kapolsek
3. Danramil

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data yakni:

1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumentasi

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif. Analisis data induktif adalah penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Adapun langkah-

langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pengumpulan data, Reduksi data, Display Data dan Pengambilan Keputusan.

Pembahasan

Koordinasi Forum Pimpinan dalam Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan dengan menggunakan teori Koordinasi menurut Hasibuan (2013:46), terdapat 2 tipe koordinasi yaitu :

1. Koordinasi horizontal adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan dalam tingkat organisasi setingkat. Pada indikator ini peneliti akan membahas terkait organisasi setingkat dalam upaya melakukan pengamanan dan ketertiban di Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan. Dalam hal ini dapat di katakan organisasi setingkat seperti Pemerintah Kecamatan, Polsek dan Koramil. Organisasi setingkat ini nantinya akan melakukan koordinasi ketika terjadi konflik atau sebelum terjadi konflik, misalnya pihak kecamatan melakukan koordinasi atau pertemuan dengan pihak keamanan agar dapat merencanakan atau mempersiapkan agenda patroli serta sosialisasi untuk para kepala desa agar dapat menjaga keamanan serta ketertiban kampung mereka masing-masing dan koordinasi ini dilakukan secara rutin oleh pihak pemerintah dan juga pihak keamanan. Namun dalam hal ini sering kali dilapangan terjadi konflik seperti kesalahpahaman antar masyarakat yang biasanya di

sebabkan oleh minuman keras ataupun masalah lainnya yang menyebabkan konflik yang ada. Melihat akan hal itu tentunya dari forum pimpinan tingkat kecamatan sendiri tentunya selalu aktif melakukan mediasi dengan para kepala desa agar dapat menjalankan dan menjaga masyarakatnya untuk tidak mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat umum, namun dari masyarakat sendirilah yang sering kali tidak dapat memahami arahan atau maksud baik dari pemerintah maupun pihak keamanan. Dari pihak forum pimpinan kecamatan sendiri sudah melaksanakan tugas mereka dengan baik artinya koordinasi yang ada sudah dijalankan semampu mereka, dan tentunya hal ini dilakukan untuk dapat menciptakan kondisi yang aman dan tertib di tengah masyarakat, namun dari beberapa masyarakat sendirilah yang memang melakukan kesalahan atau menimbulkan kekacauan atau mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat umum. Dari pemerintah dan pihak keamanan sendiri sudah melakukan upaya tindak tegas ketika mendapati ada masyarakat yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, seperti langsung memberikan sanksi fisik seperti push up dll, atau bisa saja diamankan langsung di kantor kepolisian terdekat bahkan sudah mengarahkan menulis pernyataan, namun memang masih sering terjadi konflik. Dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa terjadi konflik yang menyebabkan terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat sering kali sudah menjadi tradisi masyarakat yang

sulit untuk dihilangkan karena hal ini memang tidak lepas dari beberapa masyarakat yang ada. Dari peneliti sendiri tentunya mengharapkan agar bisa melakukan upaya penindakan langsung pada masyarakat, seperti melakukan sosialisasi langsung pada masyarakat di setiap desa yang ada di Kecamatan Maesaan dengan cara berkoordinasi dengan pemerintah desa atau kepala lingkungan untuk dapat melakukan mediasi langsung dengan pihak masyarakat yang ada. Proses koordinasi antara pihak Kecamatan sampai ke desa-desa ini merupakan salah satu cara yang paling efektif. Hal ini dapat dilihat proses penerapan koordinasi apakah berjalan dengan baik atau tidak. Karena koordinasi yang ada tentunya mempengaruhi forum pimpinan dalam keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan. Adapun koordinasi ini telah berjalan dengan baik dan telah dilaksanakan oleh pihak pemerintah dan pihak keamanan namun dari segi lapangan sendiri ternyata masih ada beberapa masalah terlebih masih sering terjadi kesalahpahaman antara masyarakat yang tentunya menimbulkan kekacauan yang tentunya mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat sekitar. Melihat ketika adanya konflik tentunya semua pihak yang berwenang langsung melakukan koordinasi untuk dapat melakukan tindakan pertama yaitu pengamanan yang bisa meleraikan terjadinya konflik. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa semua pihak yang terlibat untuk dalam menjaga keamanan dan ketertiban

di masyarakat telah menjalankan koordinasi mereka dengan baik, dan tentunya hal ini membantu masyarakat untuk dapat menjaga ketertiban dan keamanan bagi masyarakat, namun memang ada beberapa masalah dalam koordinasi ini misalnya ketika terjadi konflik di jam tertentu atau sudah larut biasanya pihak keamanan terlambat menerima informasi dikarenakan mungkin para aparat pemerintah desa yang sudah istirahat ataupun memang tidak berada di lokasi kejadian, hal ini tentunya tinggal menunggu informasi dari masyarakat yang nantinya akan melaporkan pada pihak keamanan. Hal ini tentunya menjadi tugas dari pemerintah dan juga pihak keamanan yang ada, agar supaya dapat lebih tanggap dan cepat dalam menangani keamanan dan ketertiban terlebih khusus ketika ada konflik yang terjadi. Koordinasi vertikal atau dapat dikenal dengan koordinasi antara atasan ke bawahan merupakan salah satu bagian terpenting dalam melakukan keamanan dan ketertiban antar masyarakat, apalagi di lingkup pemerintahan Kecamatan Maesaan. Koordinasi dari atasan ke bawahan ini dapat dilihat dari sinergitas antara pemerintah beserta TNI/Polri dalam melakukan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat ketika ada yang mengganggu keamanan atau ketertiban yang disebabkan oleh kesalahpahaman antar kampung atau desa di Kecamatan Maesaan. Proses koordinasi antara pihak Kecamatan sampai ke desa-desa ini merupakan salah satu cara yang paling efektif. Hal ini dapat dilihat proses penerapan koordinasi apakah berjalan dengan baik atau

tidak. Karena koordinasi yang ada tentunya mempengaruhi forum pimpinan dalam keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan. Adapun koordinasi ini telah berjalan dengan baik dan telah dilaksanakan oleh pihak pemerintah dan pihak keamanan namun dari segi lapangan sendiri ternyata masih ada beberapa masalah terlebih masih sering terjadi kesalahpahaman antara masyarakat yang tentunya menimbulkan kekacauan yang tentunya mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat sekitar. Melihat ketika adanya konflik tentunya semua pihak yang berwenang langsung melakukan koordinasi untuk dapat melakukan tindakan pertama yaitu pengamanan yang bisa meleraikan terjadinya konflik. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa semua pihak yang terlibat untuk dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat telah menjalankan koordinasi mereka dengan baik, dan tentunya hal ini membantu masyarakat untuk dapat menjaga ketertiban dan keamanan bagi masyarakat, namun memang ada beberapa masalah dalam koordinasi ini misalnya ketika terjadi konflik di jam tertentu atau sudah larut biasanya pihak keamanan terlambat menerima informasi dikarenakan mungkin para aparat pemerintah desa yang sudah istirahat ataupun memang tidak berada di lokasi kejadian, hal ini tentunya tinggal menunggu informasi dari masyarakat yang nantinya akan melaporkan pada pihak keamanan. Namun dalam hal ini sering kali dilapangan terjadi konflik seperti kesalahpahaman antar masyarakat

yang biasanya di sebabkan oleh minuman keras ataupun masalah lainnya yang menyebabkan konflik yang ada. Melihat akan hal itu tentunya dari forum pimpinan tingkat kecamatan sendiri tentunya selalu aktif melakukan mediasi dengan para kepala desa agar dapat menjalankan dan menjaga masyarakatnya untuk tidak mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat umum, namun dari masyarakat sendirilah yang sering kali tidak dapat memahami arahan atau maksud baik dari pemerintah maupun pihak keamanan.

2. Koordinasi vertikal (vertical coordination) adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit kesatuan-kesatuan kerja yang ada dibawah wewenang dan tanggung jawabnya. Tegasnya atasan mengkoordinasikan semua anggota yang ada dibawah tanggung jawabnya secara langsung. Koordinasi vertikal ini secara relatif mudah dilakukan, karena atasan dapat memberikan sanksi kepada aparat yang sulit diatur. Pada indikator ini peneliti akan membahas terkait bentuk koordinasi yang dilakukan oleh forum pimpinan dalam keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan, dalam hal ini akan di lihat dari bentuk koordinasi dari atasan ke bawahan. Sesuai dari hasil penelitian yang di peroleh menunjukkan bahwa koordinasi sejauh ini dinilai berjalan dengan baik karena dari pihak keamanan sendiri dalam memberikan arahan pada pemerintah desa berjalan dengan baik. Artinya koordinasi

forum pimpinan di tingkat kecamatan sampai pada pedesaan di Kecamatan berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari koordinasi antara pihak pemerintah Kecamatan dengan pemerintah desa dalam hal mengkoordinasikan keamanan yang ada. Namun dalam koordinasi keamanan dan ketertiban masyarakat ada juga beberapa masalah komunikasi yang di dapati seperti ketika terjadi konflik antar pemuda desa, tentunya hal ini tidak langsung dapat di koordinasi dari pihak pemerintah desa dengan forum pimpinan tingkat kecamatan, biasanya langsung di amankan pemerintah desa terlebih dahulu kemudian nantinya akan di tangani oleh pihak keamanan jika konflik tersebut sudah mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Hal ini tentunya menjadi tugas dari pemerintah dan juga pihak keamanan yang ada, agar supaya dapat lebih tanggap dan cepat dalam menangani keamanan dan ketertiban terlebih khusus ketika ada konflik yang terjadi. Koordinasi vertikal atau dapat dikenal dengan koordinasi antara atasan ke bawahan merupakan salah satu bagian terpenting dalam melakukan keamanan dan ketertiban antar masyarakat, apalagi di lingkup pemerintahan Kecamatan Maesaan. Koordinasi dari atasan ke bawahan ini dapat dilihat dari sinergitas antara pemerintah beserta TNI/Polri dalam melakukan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat ketika ada yang mengganggu keamanan atau ketertiban yang disebabkan oleh kesalahpahaman antar kampung atau desa di Kecamatan Maesaan. Proses koordinasi antara pihak

Kecamatan sampai ke desa-desa ini merupakan salah satu cara yang paling efektif. Hal ini dapat dilihat proses penerapan koordinasi apakah berjalan dengan baik atau tidak. Karena koordinasi yang ada tentunya mempengaruhi forum pimpinan dalam keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan. Adapun koordinasi ini telah berjalan dengan baik dan telah dilaksanakan oleh pihak pemerintah dan pihak keamanan namun dari segi lapangan sendiri ternyata masih ada beberapa masalah terlebih masih sering terjadi kesalahpahaman antara masyarakat yang tentunya menimbulkan kekacauan yang tentunya mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat sekitar. Melihat ketika adanya konflik tentunya semua pihak yang berwenang langsung melakukan koordinasi untuk dapat melakukan tindakan pertama yaitu pengamanan yang bisa melerai terjadinya konflik. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa semua pihak yang terlibat untuk dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat telah menjalankan koordinasi mereka dengan baik, dan tentunya hal ini membantu masyarakat untuk dapat menjaga ketertiban dan keamanan bagi masyarakat, namun memang ada beberapa masalah dalam koordinasi ini misalnya ketika terjadi konflik di jam tertentu atau sudah larut biasanya pihak keamanan terlambat menerima informasi dikarenakan mungkin para aparat pemerintah desa yang sudah istirahat ataupun memang tidak berada di lokasi kejadian, hal ini tentunya tinggal menunggu informasi dari

masyarakat yang nantinya akan melaporkan pada pihak keamanan. Namun dalam hal ini sering kali dilapangan terjadi konflik seperti kesalahpahaman antar masyarakat yang biasanya di sebabkan oleh minuman keras ataupun masalah lainnya yang menyebabkan konflik yang ada. Melihat akan hal itu tentunya dari forum pimpinan tingkat kecamatan sendiri tentunya selalu aktif melakukan mediasi dengan para kepala desa agar dapat menjalankan dan menjaga masyarakatnya untuk tidak mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat umum, namun dari masyarakat sendirilah yang sering kali tidak dapat memahami arahan atau maksud baik dari pemerintah maupun pihak keamanan. Dari pihak forum pimpinan kecamatan sendiri sudah melaksanakan tugas mereka dengan baik artinya koordinasi yang ada sudah dijalankan semampu mereka, dan tentunya hal ini dilakukan untuk dapat menciptakan kondisi yang aman dan tertib di tengah masyarakat, namun dari beberapa masyarakat sendirilah yang memang melakukan kesalahan atau menimbulkan kekacauan atau mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat umum. Dari pemerintah dan pihak keamanan sendiri sudah melakukan upaya tindak tegas ketika mendapati ada masyarakat yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, seperti langsung memberikan sanksi fisik seperti push up dll, atau bisa saja diamankan langsung di kantor kepolisian terdekat bahkan sudah mengarahkan menulis pernyataan, namun memang masih sering terjadi konflik. Dalam hal ini peneliti

menyimpulkan bahwa terjadi konflik yang menyebabkan terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat sering kali sudah menjadi tradisi masyarakat yang sulit untuk dihilangkan karena hal ini memang tidak lepas dari beberapa masyarakat yang ada. Dari peneliti sendiri tentunya mengharapkan agar bisa melakukan upaya penindakan langsung pada masyarakat, seperti melakukan sosialisasi langsung pada masyarakat di setiap desa yang ada di Kecamatan Maesaan dengan cara berkoordinasi dengan pemerintah desa atau kepala lingkungan untuk dapat melakukan mediasi langsung dengan pihak masyarakat yang ada.

Penutup

Kesimpulan

Dalam hal ini dapat di katakan organisasi setingkat seperti Pemerintah Kecamatan, Polsek dan Koramil. Organisasi setingkat ini nantinya akan melakukan koordinasi ketika terjadi konflik atau sebelum terjadi konflik, misalnya pihak kecamatan melakukan koordinasi atau pertemuan dengan pihak keamanan agar dapat merencanakan atau mempersiapkan agenda patroli serta sosialisasi untuk para kepala desa agar dapat menjaga keamanan serta ketertiban kampung mereka masing-masing dan koordinasi ini dilakukan secara rutin oleh pihak pemerintah dan juga pihak keamanan. Namun dalam hal ini sering kali dilapangan terjadi konflik seperti kesalahpahaman antar masyarakat yang biasanya di sebabkan oleh minuman keras ataupun masalah lainnya yang menyebabkan konflik yang ada..

Saran

Disarankan juga untuk koordinasi horizontal atau koordinasi dengan organisasi setingkat dalam hal ini pemerintah Kecamatan, Polsek dan Koramil di Kecamatan Maesaan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat seharusnya melakukan pertemuan rutin sampai pada tingkat lingkungan ada di Kecamatan Maesaan dengan tujuan agar dapat melakukan mediasi dengan masyarakat desa yang ada untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus memberikan dampak atau sanksi jika ada masyarakat yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat umum.

Disarankan untuk koordinasi horizontal dari atasan atau bawahan baik dari pemerintah ditingkat kecamatan dalam melakukan koordinasi dengan pemerintah desa ataupun tokoh masyarakat seharusnya melakukan mediasi secara rutin untuk dapat mencegah terjadinya konflik yang ada, karena dapat dilihat bahwa koordinasi selama ini walaupun sudah baik namun belum ada koordinasi secara rutin, hanya dilakukan koordinasi ketika ada yang mengganggu keamanan dan ketertiban di tengah lingkungan masyarakat yang ada di Kecamatan Maesaan.

Daftar Pustaka

- Aziz, M. S., & Wicaksono, M. A. (2020). Komunikasi Krisis Pemerintah Indonesia Dalam Penanganan Covid-19. *Masyarakat Indonesia*, 46(2), 194– 207.
- A Pearce II Jhon.Richard B. Robinson Jr.(2013).*Manajemen Strategis : Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian*, Terj. Nia Pramita Sari.Jakarta : Salemba Empat.
- Arif Budiman. 1995. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Gramedia Pustaka Utama.
- Arsyad, Azhar. 2002. *Media Pembelajaran*, edisi 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Cangara, H. (2017). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. PT. Raja Grafindo Utama.
- Erliana, H. (2005). *Komunikasi Pemerintahan*. Rafika Aditama
- Hasibuan, Malayu S.P, 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Askara.
- Handyaningrat, Soewarno. 1992. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : Cv Haji Masagung.
- Hadari Nawawi, H. Murni Martini, *Penelitian Terapan (Yogyakarta : Gajah Mada University Press,cet . 2, 2006)*
- Maulidiah, S. (2018). Fungsi Forum Koordinasi Pemerintahan Daerah (FORKOPIMDA) Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal Of Government*
- Moekijat. 2005. *Pengantar Sistem Informasi Manajemen*, cetakan ke-9. Penerbit CV. Mandar Maju: Bandung.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Miles, M.B & Huberman A.M. 1984, *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- Onong Uchjana, E. (2009). *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek (Cetakan ke)*. Remaja Rosdakarya.
- Ruliana, P. (2014). *Komunikasi Organisasi : Teori dan Studi Kasus*. Rajawali Pers
- Soewarno Handyaningrat, 2006, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi*

- dan Manajemen, Jakarta: Gunung Agung.
- S.P,Hasibuan, Malayu. 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Silalahi, Ulber. (2012). Metode Penelitian Sosial. Bandung: Replika Aditama.
- Sugandha, Dann. 2011. Koordinasi, Alat Pemersatu Gerakan Administrasi. Jakarta: Intermedia.
- Winardi, 2004, Manajemen Perilaku Organisasi, Kencana Prenada Media Group, Bandung.

Sumber-sumber Lainnya:

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah pada Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan..